

Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Bangsa

Yusdani

The following article traces several factors cause radical understanding and attitude of religious followers either internal factors or external factors. According to writer, in terms of pluralism, global society and democratization, the notion of religion and the religious attitude that needed by society currently, for instance multicultural horizon and humanist multicultural. In the context of Indonesia that concerning to human issues and based on the unity in diversity, invite the religion followers in Indonesia to change vision from narrow and normative to historical inclusive and humanist.

Kata-kata kunci: *religiusitas, multicultural, inclusive-pluralis dan humanis*

Agama dewasa ini terkesan membuat agengar dan cemas lantaran seringnya tampil dengan wajah yang penuh kekerasan. Agama tampak kehilangan wajah ramahnya. Lihat saja serangkaian bom bunuh diri di Israel yang mewaskan warga sipil, teror gas beracun Aum Shinrikyo pimpinan Asahara Shoko di Jepang (1990-an), kekerasan rezim Taliban di Afghanistan atas nama ketaatan terhadap syariat Islam sebagai hukum negara, kekerasan kelompok ekstrem Yahudi Israel, pimpinan Rabi Meï Kahape atas warga Arab Palestina, bunuh diri masal pada Peoples Temple pimpinan Jim Jones di Guyana (1970-an), dan pada gerakan David Koresh di Texas (1990-an). Puncaknya tragedi WTC 11 September di Amerika yang mewaskan ribuan manusia yang tak tahu apa-apa.¹

Beberapa tahun belakangan ini di Indonesia, isu radikalisme agama sangat menguat dan mengguncangkan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Peristiwa bom Bali menewaskan ratusan nyawa; ledakan bom di Hotel JW Marriot, Jakarta dan tempat-tempat lainnya. Kelompok agama fundamentalisme berjuang sekuat tenaga dan dengan segala cara, memperjuangkan visi dan misi mereka, tanpa peduli akan kenyataan dalam masyarakat bahwa bangsa ini adalah pluralis.

Di tengah-tengah pro dan kontra ancaman kelompok agama fundamentalisme di atas, kini muncul pertanyaan, ada apa dengan agama? Apakah agama memang melegitimasi kekerasan, bahkan teror? Apakah agama berperan sebagai sumber problem atau sumber solusi? Apakah radikalisme agama merupakan ancaman bagi sebuah bangsa yang majemuk? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini wajar terlontar, mengingat bahwa agama selama ini diklaim pemeluknya sebagai pembawa misi perdamaian dunia.

¹ Sindhunata dalam Charles Kimball. 2003. *Kala Agama Jadi Bencana* Pengantar Dr. Sindhunata terjemahan Nurhadi dari *When Religion Becomes Evil*. Bandung: Mizan. hlm.13-21.

Akar Kekerasan atas Nama Agama

Untuk menjelaskan lebih jauh mengapa agama demikian garang dan kejam, tidak dapat serta merta agama dituduh sebagai biang masalah. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas bergantung pada bagaimana orang memahami hakikat agama itu sendiri. Agama, dalam kaitan ini, harus dipahami dalam konteks relasinya dengan kehidupan riil manusia. Naif jika agama diposisikan bebas dari segenap kenyataan hidup.

Agama, dalam konteks di atas merupakan kekuatan penting bagi kehidupan manusia. Karena itulah agama justru harus ditempatkan secara proporsional dalam konteksnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "agama bukan pulau dalam dirinya" (*no religion is an island*).² Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa sekarang agama harus dipahami dan ditafsirkan dalam konteks pluralisme global. Kenyataan plural dunia ini hendaknya dijadikan titik tolak dalam memahami posisi agama dewasa ini.

Adanya berbagai bencana dan tragedi kemanusiaan yang melibatkan agama, seperti dikemukakan di atas, tidak lain adalah akibat terjadinya pembusukan dan pengorupsian agama. Setidaknya, terdapat lima tanda proses pembusukan dan pengorupsian agama, yaitu:

1. Klaim kebenaran

Adanya klaim ini pada gilirannya mendegradasi pemahaman umat beragama terhadap ke-Segala-Maha-an Tuhan. Biasanya hal ini disebabkan pemeluk agama meyakini bahwa kitab suci mereka memang mengajarkan kebenaran monolitik (tunggal). Penafsiran kitab suci, dengan demikian berperan penting dalam mewarnai sikap umat beragama.³

2. Ketaatan buta terhadap pemimpin agama

Munculnya gerakan-gerakan keagamaan radikal, seperti People Temple pimpinan Jim Jones di Guyana, atau Aum Shinrikyo di bawah pimpinan David Koresh di Texas, tak pelak dari ketaatan buta ini. Darinya lahir keberagamaan yang membabi buta dan fanatisme berlebihan.⁴

3. Upaya-upaya membangun zaman ideal

Dalam hal ini dijelaskan bahwa jika visi agama tentang zaman ideal itu diwujudkan dan para pemeluknya meyakini sebagai kehendak Tuhan sendiri, maka agama sebenarnya telah terkorup, dan karenanya jahat. Di Afghanistan, dapat disaksikan bagaimana rezim Taliban berbuat kekejaman terhadap warganya sendiri dengan dalih ketaatan terhadap syariat Islam.⁵

4. Tujuan menghalalkan segala cara

Tanda ini biasanya terjadi pada komponen-komponen agama, baik berkaitan identitas maupun institusi agama. Ambisi menunjukkan identitas agama Kristen, misalnya, telah mengakibatkan pembantaian orang Yahudi pada masa Nazi.⁶

5. Perang Suci

Puncak dari keempat tanda di atas adalah merebaknya ide perang suci (*holy war* atau *jihad*). Di sepanjang sejarah, ide inilah yang melandasi terjadinya kekerasan

² *Ibid*, hlm.27.

³ Charles Kimball.2003. *Kala Agama Jadi Bencana* Pengantar Dr. Sindhunata terjemahan Nurhadi dari *When Religion Becomes Evil*. Bandung: Mizan.,hlm. 84-119.

⁴ *Ibid*, hlm.125-157.

⁵ *Ibid*, hlm.164-191.

⁶ *Ibid*, hlm. 197-228.

dan konflik agama. Ini juga yang tampak pada peristiwa terjadinya pengeboman gedung WTC di Amerika, bom Bali dan aksi-aksi terorisme lainnya, juga berada dalam kerangka menegakkan perintah suci Tuhan yang dianggap pelakunya sebagai jalan suci.⁷

Sedangkan di sisi lain munculnya radikalisme (agama) ditandai oleh tiga kecenderungan umum, yaitu:

Pertama, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak.

Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia (*world view*) tersendiri. Kaum radikal berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang sudah ada.

Ketiga, kaum radikal memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikal memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan.⁸

Penjelasan tentang sumber dan faktor penyebab timbulnya kekerasan dan radikalisme agama tersebut di atas sedikit banyak pembenarannya akan segera tampak ke permukaan tatkala terjadi konflik atas nama agama dan aksi terorisme di mana-mana. Secara empirik, radikalisme agama di belahan dunia muncul dalam

bentuknya yang paling konkret, yakni kekerasan atau konflik. Di Bosnia misalnya, kaum Ortodoks, Katolik, dan Islam saling membunuh. Di Irlandia Utara, umat Katolik dan Protestan saling bermusuhan. Begitu juga di Tanah Air terjadi konflik antaragama di Poso dan di Ambon. Kesemuanya ini memberikan penjelasan betapa radikalisme agama sering kali menjadi pendorong terjadi konflik dan ancaman bagi masa depan perdamaian.⁹

Keterangan tersebut di atas juga memiliki signifikansi strategis, di tengah menguatnya sentimen keagamaan

⁷ *Ibid*, hlm. 234-263.

⁸ Adrian Renaldi, "Radikalisme Agama Ancaman bagi Pemilu 2004?" From <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0402/10/opi02.html>, accessed, 12 Januari 2005.

⁹ Menurut sosiolog Jerman, Max Weber, struktur dan tindakan suatu kelompok sosial berasal dari komitmennya pada sistem kepercayaan tertentu, yang juga menjadi asal tujuan, standar perilaku dan legitimasi kekuasaan. Meski teori ini sampai kini masih menimbulkan pro-kontra, namun tak dapat dibantah bahwa agama merupakan salah satu faktor yang sedikit banyaknya memiliki andil dalam membentuk hal ini, di samping faktor-faktor lain seperti politik dan ekonomi. Salah satu hal yang merupakan manifestasi dari fungsi ini adalah bahwa agama bisa terefleksi menjadi faktor integratif bagi pemeluknya, dan sekaligus faktor disintegratif antarpemeluk agama yang berbeda terutama jika agama ini dipahami secara absolut dan eksklusif. Kasus konflik sosial di Ambon yang kemudian meluas menjadi kasus Maluku merupakan contoh konkret bagi fungsi potensial agama ini. Memang kasus Maluku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, termasuk faktor ekonomi dan politik. Namun jelas, bahwa agama menjadi satu faktor yang cukup dominan juga. Kenyataan ini mendorong kita untuk melihat bagaimana umat beragama memosisikan dan menginterpretasikan ajaran agama

berlebihan yang acapkali tak menguntungkan banyak pihak. Di samping itu uraian tersebut menyumbangkan betapa urgennya wacana keberagaman yang patut diperhitungkan. Hal ini juga memberikan perspektif umat beragama yang banyak bergumul dengan soal-soal hubungan antaragama. Analisis tersebut dapat menyumbangkan analisis kritik terhadap akar sinisme terhadap agama sekaligus mengajak penganut agama beragama secara kritis tanpa kehilangan semangat spiritualnya. Untuk konteks keindonesiaan yang sedang *concerned* dengan isu-isu kemanusiaan, mengajak umat beragama di Indonesia bersama-sama mengubah visi keberagaman dari visi keberagaman yang sempit dan normatif menjadi inklusif historis dan humanis.¹⁰

Berkembangnya radikalisme agama di Indonesia, sebenarnya bukan hanya satu kenyataan sosio-historis dalam negara majemuk, juga dapat menjadi ancaman bagi masa depan bangsa yang mendambakan keamanan dan kedamaian.

Tindakan radikalisme itu dilakukan bertujuan sebagai membela agama tetapi justru telah mengabaikan nilai-nilai agama sebagai pembawa damai dan kemanusiaan. Orang-orang radikal kurang begitu menyadari bahwa memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam agama tidak dapat dibenarkan kalau menggunakan media kekerasan.

Semua orang menyambut baik ketika pengadilan Denpasar, Bali, menvonis pelaku bom Bali dengan hukuman seumur hidup dan hukuman mati atas tindakan yang telah melenyapkan ratusan nyawa. Akan tetapi apakah itu efektif? Sebagian orang masih meragukan efektivitas hukuman itu untuk mengatasi aksi kekerasan atau terorisme.

Cara itu masih menyisakan sejumlah persoalan karena penyelesaian hukum tidak menyentuh masalah terorisme itu secara komprehensif. Hukuman hanyalah sebuah *shock therapy*. Oleh karena itu, terorisme sesungguhnya terkait dengan beberapa masalah mendasar, antara lain, *pertama*, adanya wawasan keagamaan yang keliru. *Kedua*, penyalahgunaan simbol agama. *Ketiga*, lingkungan yang tidak kondusif yang terkait dengan kemakmuran dan keadilan. *Keempat*, faktor eksternal yaitu adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan satu kelompok atau negara terhadap sebuah komunitas. Akibatnya, komunitas yang merasa diperlakukan tidak adil bereaksi. Oleh karena itu, terorisme hanya dapat dicegah secara fundamental kalau keempat pokok masalah tersebut disentuh.¹¹

mereka masing-masing, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat bangsa yang plural ini, baca Masykuri Abdillah, "Agama dalam Pluralitas Masyarakat Bangsa" dalam *Harian Kompas* (opini) Jumat 25 Februari 2000.

¹⁰ Pandangan senada pernah dikemukakan masing-masing dalam *Cita dan Fakta Toleransi Islam* (Arasy, 2003) karya Khalid Abou El Fadl dan *The Heart of Islam* karya Seyyed Hosein Nasr (Mizan 2003). Karya Nasr ini mencoba menghadirkan visi universal dan keterbukaan Islam baik secara normatif maupun historis. Nasr, dengan visi Islam tradisionalnya, menampak kekerasan atas nama agama. Baginya, pluralisme agama bukan untuk diperkeruh dengan berbagai konflik tetapi justru ditempatkan pada upaya pencapaian spiritualitas universal agama-agama. Jika buku El Fadl dan Seyyed Hosein Nasr berbicara dalam konteks agama Islam, Kimball dengan karyanya tersebut memberikan perspektif seorang Kristiani yang banyak bergumul dengan soal-soal hubungan antaragama.

¹¹ Hasyim Muzadi, dalam *Kompas* tanggal 2/9/03.

Visi Religiositas dalam Masyarakat Multikultural

Dengan dinamika kehidupan yang terus berkembang, dan semakin kompleksnya persoalan kehidupan masyarakat sekarang ini, maka fokus sekarang lebih memerlukan perwujudan rasa kemanusiaan dengan pengembangan wawasan *multikultural* serta dengan pendekatan yang bersifat *Humanis Cultural*.

Dalam kaitan pengembangan wawasan multikultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat hasilnya kelak diharapkan terwujud masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, teradisi, adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah berkembang kerjasama sosial dan tolong menolong secara tulus sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari ajaran agama masing-masing

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*). Hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial di seluruh wilayah Indonesia. *Semboyan Bhineka Tunggal Ika* (Berbeda-beda namun satu jua) menggambarkan bahwa sejak awal bangsa Indonesia memang ditakdirkan sebagai bangsa yang majemuk. Kemajemukan Indonesia ditandai oleh berbagai perbedaan, meliputi perbedaan horizontal seperti kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama. Sedangkan, perbedaan yang bersikap vertikal menyangkut perbedaan-perbedaan lapisan atas dan bawah yang dalam kondisi saat ini sangat tajam, baik dibidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya.¹²

Kemajemukan Indonesia seperti di atas, dipicu oleh kesenjangan sosial dan ekonomi yang tajam dan belum tumbuhnya budaya multikultural yang lebih memungkinkan masyarakat Indonesia membangun kerja sama dan kemitraan secara tulus. Yang terjadi adalah bentuk kerjasama semu dan bersifat dipaksakan. Seandainya kerjasama antar kelompok dapat berkembang secara tulus, hal ini dapat menjaga keharmonisan hubungan antara umat beragama yang sering dihadapkan pada problema kemajemukan.

Karena itulah, bentuk-bentuk radikalisme agama yang dipraktikkan oleh sebagian umat beragama seharusnya tidak sampai menghadirkan ancaman bagi masa depan bangsa. Pluralisme tetap menjadi komitmen bangsa ini untuk membangun bangsa yang modern, yang di dalamnya terdapat banyak agama dan etnis secara damai. Pluralisme adalah simbol bagi suksesnya kehidupan masyarakat majemuk. Karena itu, agama yang dimiliki oleh masing-masing umat tetap terjaga sebagai sosok keyakinan yang tidak melampaui batas. Sebab, bagaimanapun agama sangat diperlukan untuk mengisi kehampaan spiritual umat, tetapi segala bentuk ekspresinya tidak boleh menghadirkan ancaman bagi masa depan dunia yang damai. Kalau kaum radikal

¹² Dalam soal kemajemukan agama misalnya, Biro Pusat Statistik (BPS) menurut sensus tahun 1990 mencatat agama yang dianut penduduk Indonesia sebagai berikut: Penganut Islam 156.318.610 (87,21%), Kristen Protestan 10.820.769 (6,04%), Katolik 6.411.794 (3,58%), Hindu 3.287.309 (1,83%), Budha 1.840.693 (1,02%), dan lainnya 568.608 (0,32%). Belum terhitung jumlah sekte dan aliran, Lembaga dan organisasi-organisasi keagamaan yang mencapai puluhan bahkan ratusan.

agama mengekspresikan keyakinannya dalam bentuk kekerasan, maka ini merupakan ancaman besar bagi pluralisme.¹³

Banyak hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa peledakan bom di Bali. Peristiwa itu dapat digunakan untuk memperluas kembali gerakan umat yang moderat, inklusif, dan pluralis di tengah-tengah masyarakat beragama. Gerakan inklusif didasarkan pada dua hal, yaitu:

Pertama, secara diskursif, gerakan inklusif umat diyakini sebagai penopang bagi terciptanya harmonisasi sosial masyarakat di era multikultural. Karena bagaimanapun, multikulturalisme adalah suatu kenyataan historis di dalam masyarakat yang harus disikapi secara baik. Di sinilah eksklusivitas beragama yang diyakini secara total sebagai kebenaran agama (*religious truth*) dapat menjadi batu sandungan ideologis untuk menyampaikan pesan perdamaian. Itu sebabnya, pendidikan pluralis tetap menjadi prioritas utama dalam menjembatani doktrin eksklusif yang selama ini diyakini umat.

Kedua, secara praksis, praktik kehidupan beragama yang masih mendikotomikan klaim kebenaran dan keselamatan di dalam masing-masing umat agama mesti dikikis habis agar tidak terjadi sikap saling menyalahkan antara satu agama dengan agama lainnya. Bukankah, problem pluralisme kerap kali disebabkan oleh fanatisme kebenaran agama yang menimbulkan sikap-sikap radikal. Karena itulah, upaya-upaya konkret untuk membangun toleransi antarumat beragama mesti terus dilakukan sebagai bagian dari proses sosial yang berkelanjutan.¹⁴

Dengan demikian, secara wacana dan praksis gerakan, sikap umat agama agar tidak sampai pada kesadaran dan gerakan radikal, perlu dilakukan langkah-langkah

pembakaran (*dekonstruksi*) kesadaran eksklusif, militan, dan radikal adalah langkah awal untuk menjamin masa depan pluralisme. Pada gilirannya, pembangunan kembali (*rekonstruksi*) kesadaran agama yang toleran, inklusif, dan pluralis adalah langkah terakhir untuk menyampaikan pesan perdamaian agama-agama di tengah-tengah masyarakat multikultural. Inilah kondisi yang segenap bangsa Indonesia inginkan dalam menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik di tengah-tengah ancaman terorisme dan kekerasan.¹⁵

Islam dan Masa Depan Bangsa Indonesia

Tujuan sentral Alquran adalah untuk menciptakan tata sosial yang anggun dan hidup di muka bumi, yang adil dan didasarkan pada etika.¹⁶ Dalam perspektif Islam apakah individu yang lebih penting atautkah masyarakat, tidak menjadi soal. Yang jelas antara individu dan masyarakat berkaitan. Umpamanya individu tanpa masyarakat (*a societiless individual*)¹⁷ tidak akan ditemukan di muka bumi ini. Yang amat ditekankan Islam ialah perlunya keamanan ontologis (*ontological security*) bagi binaan sebuah masyarakat dan peradaban yang prinsip moral-transendental menjadi asasnya yang utama. Tanpa asas moral yang kukuh ini jangan diharapkan bahwa keadilan menjadi cita-cita abadi umat

¹³ Adrian Renaldi, "Radikalisme Agama Ancaman bagi Pemilu 2004?" From <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0402/10/opi02.html>, accessed, 12 Januari 2005.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Fazlur Rahman. 1980. *Major Themes of the Qur'an*. Minneapolis Chicago: Bibliotheca Islamica.hlm. 37.

¹⁷ *Ibid.*

sejagat akan terwujud. Konsep masyarakat mekanistik (*a mechanistic conception of society*)¹⁸ tidak memberi peluang kepada manusia untuk menjadi manusia penuh dan bebas.

Alquran sebagai dokumen moral tampaknya akan tetap mencabar otak dan hati manusia sebagai inspirasi terbesar bagi pencarian jalan keluar dari kemelut kemanusiaan pada masa-masa yang akan datang. Doktrin tentang keesaan Allah dan kesatuan umat manusia adalah doktrin sentral dalam Alquran. Dari doktrin inilah kemudian mengalir prinsip-prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaraan, dan toleransi. Amat disayangkan, doktrin-doktrin yang begini anggun dan "tahan banting" itu telah terkubur dalam abu sejarah selama berabad-abad dalam masyarakat dan peradaban umat Islam.¹⁹

Penjelasan tentang cita-cita kebangsaan dan masyarakat dalam perspektif di atas, menunjukkan bahwa ide tauhid dan kemanusiaan yang begitu sentral dalam Alquran telah memberikan ontologi bagi bangunan sebuah masyarakat dan peradaban yang hendak dibangun. Di atas landasan ontologi yang kuat, masyarakat yang hendak dibangun itu haruslah: terbuka, demokratik, toleran, dan damai. Empat ciri utama ini hendaklah dijadikan acuan bagi semua gerakan pembangunan moral dan masyarakat di muka bumi ini. Islam amat mendambakan terwujudnya sebuah bangunan masyarakat yang berwajah ramah dan anggun.

Dalam masyarakat dimaksud perbedaan agama, ideologi, dan nilai-nilai budaya, tidak boleh dijadikan penghambat untuk tercapainya cita-cita di atas. Ciri keterbukaan tersebut berangkat dari sifat Alquran sebagai Kitab Suci yang terbuka. Terbuka untuk diterima atau untuk ditolak. Yang menolak Alquran tidak harus

dikucilkan dari masyarakat. Islam menerima hakikat pluralisme agama dan budaya. Sikap yang harus dikembangkan bukan sikap "monopoli" kebenaran, tetapi sikap saling menghargai dan menghormati. Keterbukaan adalah watak dari sebuah perbedaan yang optimis. Sikap terbuka inilah pada masa lampau yang mendorong umat Islam berkenalan secara bebas dengan warisan ruhani hellenisme, Persia dan India. Adapun pada saat umat Islam telah kehilangan rasa percaya diri, sikap keterbukaan ini menjadi semakin redup. Dunia lalu menjadi amat sempit.

Kemudian paham persamaan Islam pasti punya dampak terhadap politik. Masyarakat Islam haruslah sebuah masyarakat yang demokratik. Sistem-sistem politik yang otoriter apa lagi yang totaliter harus dinyatakan sebagai sistem yang haram dalam perspektif Islam, apapun alasannya. Hanya dalam sistem politik demokratislah anggota masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya secara kreatif dan bebas sampai batas-batas yang jauh untuk menjadi manusia penuh.

Dalam sistem demokrasi yang diinginkan Islam, nilai-nilai intelektual dan nilai-nilai spiritual haruslah saling menopang dan saling melengkapi. Demokrasi mesti punya orientasi moral. Inilah barangkali yang dimaksud Iqbal sebagai demokrasi spiritual yang menjadi tujuan tertinggi Islam²⁰ dalam kehidupan kolektif. Di bawah payung demokrasi spiritual ini masalah keadilan

¹⁸ Bertrand Russel dan Rosa Russel. 1970. *The Prospects of Industrial Civilization*. London: George Allen & Unwin. hlm. 8.

¹⁹ Ahmad Syafii Ma'arif. 1995. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 70-71.

²⁰ Muhammad Iqbal. 1972. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Muhammad Ashraf. hlm. 180.

tidak lagi menjadi isu politik karena lawannya berupa ketidakadilan dinilai masyarakat sebagai budaya yang amat rendah dan tidak patut dilakukan oleh manusia beradab.

Politik demokratis memerlukan toleransi. Tanpa toleransi sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup aman dan damai. Dalam masalah toleransi ini, Islam boleh berbangga diri, khususnya terhadap kelompok non-Muslim. Dalam kasus ini, Islam normatif dan Islam sejarah seakan-akan telah menyatu. Hanyalah pada peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak punya dampak besar sajalah umat Islam boleh jadi kurang menghiraukan budaya toleransi ini. Buku-buku sejarah banyak melukiskan ketinggian budi umat Islam dalam masalah tenggang rasa ini.

Akan tetapi yang ironis justru terletak pada kenyataan betapa sukarnya dikembangkan sifat toleransi internal di kalangan umat Islam sendiri, khususnya dalam politik. Di kawasan ini iklim psikologi umat memang sering rawan. Sudah cukup banyak darah yang tertumpah di kalangan sesama umat Islam, demi kekuasaan. Hal ini semuanya adalah penyakit kanak-kanak yang sukar sembuh dalam sejarah Islam. Alangkah idealnya bila dalam masalah politik ini dibudayakan prinsip: "Berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan".

Apabila umat Islam benar-benar mau membangun dalam makna yang komprehensif, prinsip yang dikemukakan hendaklah dijadikan landasan dalam perilaku dan politik. Dalam tamansari demokrasi spiritual, tidak ada ruang untuk saling menjegal dan menggantung dalam lipatan, sebab pasti akan merobek-robek prinsip-prinsip moral yang merupakan manifestasi iman dalam kehidupan masyarakat. Kemudian untuk menjadikan umat Islam *umat al-'ilm*

(komunitas ilmu), tidak ada pilihan lain kecuali budaya toleransi internal diwujudkan secara mantap sebagai kemestian sejarah.²¹

Ciri penting terakhir dari sebuah masyarakat Islam ialah agar ia memancarkan wajah damai selaras dengan *the very root* dari perkataan Islam itu: s-l-m, bermakna damai, sejahtera, selamat. Wajah-wajah yang mengerikan yang berlindung di balik label Islam adalah suatu pengkhianatan dan pencerobohan terhadap maksud Islam itu sendiri. Memperbaiki citra diri ini perlu dijadikan program utama oleh seluruh gerakan Islam. Hanya sewaktu menghadapi musuh yang garang saja Islam perlu bersifat tegas dan pasti.²²

Dengan segala kelemahan dan kekurangannya, bangsa Muslim Indonesia sejak masa pergerakan nasional memilih sistem politik demokrasi sebagai wahana yang terbaik untuk membumikan cita-cita kemerdekaan. Pilihan ini dapat dinilai sebagai pilihan terbaik, tepat, dan benar. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika organisasi-organisasi sosio-keagamaan dan sosio-politik Islam adalah sebagai pelopor utama bagi cita-cita demokrasi.

Perkembangan, prospek dan masa depan politik Indonesia pasca- Orde Baru dan memasuki era reformasi akan membawa kepada berbagai implikasi. Khusus bagi perkembangan diskursus pemikiran dan praktek Islam itu sendiri. Untuk itu para pemikir dan aktivis politik Islam perlu (1) mereformulasikan dasar-dasar keagamaan/teologis ke dalam bidang politik secara cerdas; (2) mendefinisikan ulang cita-cita politik; dan (3) merumuskan kembali

²¹ Ahmad Syafii Maarif. 1995. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 70-71.

²² *Ibid.*

strategi perjuangan politik Islam.

Faktor utama yang menyebabkan kemandekan politik di Indonesia selama Orde Lama dan awal Orde Baru adalah keinginan para pemimpin politik Islam untuk membangun hubungan Islam dan negara secara legalistik dan formalistik. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia sekarang perlu dikembangkan pemikiran bahwa Islam lebih mementingkan terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang baik, yaitu masyarakat yang merefleksikan prinsip keadilan, egalitarianisme, partisipasi, musyawarah dan sebagainya. Sejauh mekanisme tatanan kemasyarakatan dan negara diatur dengan prinsip-prinsip dasar seperti itu,²³

Penutup

Dengan demikian dasar-dasar politik yang dikembangkan lebih berorientasi pada nilai daripada simbol. Implikasi dari formulasi teologis politik di atas adalah bahwa cita-cita politik Islam adalah terbentuknya sebuah sistem sosial dan politik yang merefleksikan, atau sesuai dengan, nilai-nilai Islam. Karena prinsip-prinsip etis politik Islam berbicara tentang keadilan (*adl*), musyawarah (*syura*), persamaan (*musawa*), bentuk sistem kenegaraan yang secara substantif mencerminkan nilai-nilai Islam adalah demokrasi.

Untuk itu, perumusan cita-cita politik Islam masa depan di Indonesia berujung pada (1) terbentuknya mekanisme politik yang sifatnya egaliter dan demokratis; dan (2) berlakunya proses ekonomi yang lebih kurang equitable.²⁴ Karena watak cita-cita politik Islam itu universal, pendekatannya pun harus bersifat integratif, dengan melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Dengan demikian, cita-cita untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi hendak-

nya dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada.²⁵

Berpangkal tolak dari cita-cita politik Islam tersebut, strategi perjuangan politik Islam yang dikembangkan lebih bersifat inklusif, integratif, dan diversifikatif yang dirumuskan dalam kerangka cita-cita masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa agenda ini meliputi soal-soal demokratisasi, toleransi politik dan agama, egalitarianisme sosial-ekonomi dan partisipasi politik. Hal ini semua menghendaki adanya sebuah transformasi yang cukup berarti dalam pemikiran dan praktek politik Islam. Dalam konteks yang lebih empirik, intelektualisme dan aktivisme politik dikembangkan untuk menghadirkan sebuah Islam politik yang lebih inklusif dan integratif dalam hubungannya dengan konstruk negara Indonesia yang ada. ●

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. 2000. "Agama dalam Pluralitas Masyarakat Bangsa" dalam *Harian Kompas* (opini) Jumat 25 Februari 2000.
- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy. 1990. *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan.

²³ Robert N. Bellah. 1991. *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press. hlm. 151.

²⁴ Bosco Carvalo dan Dasrizal. (Ed.). 1983. *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Leppenas.

²⁵ Bahtiar Effendy. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina dan Ibnu Sina

- Bellah, Robert N.. 1991. *Beyond Belief : Essays on Religion in a Post – Traditionalist World*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press.
- Carvalo, Bosco dan Dasrizal. (Ed.).1983. *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta : Leppenas.
- Effendy, Bahtiar.1998.*Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta : Paramadina dan Ibnu Sina
- Iqbal, Muhammad. 1972. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Muhammad Ashraf.
- Kimball, Charles.2003. *Kala Agama Jadi Bencana* Pengantar Dr. Sindhunata terjemahan Nurhadi dari *When Religion Becomes Evil*. Bandung: Mizan.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1995. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muzadi, Hasyim.2003. dalam *Kompas* tanggal 2/9/03.
- Philpott, Simon.2000. *Rethinking Indonesia Postcolonial Theory Authoritarianism and Identity*. London & New York :Macmillan Press LTD & ST. Martin's Press LLC.
- Rahman, Fazlur. 1980. *Major Themes of the Qur'an*. Minneapolis Chicago: Bibliotheca Islamica.
- Renaldi, Adrian. 2005. "Radikalisme Agama Ancaman bagi Pemilu 2004?" From <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0402/10/opi02.html>, accessed, 12 Januari 2005.
- Russel, Bertrand dan Rosa Russel. 1970. *The Prospects of Industrial Civilization*. London: George Allen & Unwin.
- Sindhunata dalam Charles Kimball. 2003. *Kala Agama Jadi Bencana* Pengantar Dr. Sindhunata terjemahan Nurhadi dari *When Religion Becomes Evil*. Bandung: Mizan. hlm.13-21.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.
- Syamsuddin, M. Din.2001. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Pengantar Bahtiar Effendy. Jakarta :Logos.
- Thaba, Abdul Azis. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta : Gema Insani Press.

